

# Penerapan Manajemen Pancasila dalam Menghidupkan Bangsa dan Pembangunan Era Globalisasi

## *(Implementation of Pancasila Management in Reviving the Nation and Development of the Globalization Era)*

Oleh:

**Raymond Sulistio; Muhammad Naim; Sutarto; Andrian Permana, Muhamad Sapruwan**

Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa

[mond.ray00@gmail.com](mailto:mond.ray00@gmail.com); [gununglano728@gmail.com](mailto:gununglano728@gmail.com); [sutartokusuma@gmail.com](mailto:sutartokusuma@gmail.com);

[andrianpermana01@gmail.com](mailto:andrianpermana01@gmail.com); [msapruwan@gmail.com](mailto:msapruwan@gmail.com)

### ABSTRAK

*Pancasila merupakan manajemen berbasis kearifan lokal yang tak terpisahkan dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah mengilhami garis hidup penduduk bangsa Indonesia, makna dari setiap sila Pancasila memiliki potensi untuk menggiring bangsa ini keluar dari permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya dan bisnis. Pada zaman globalisasi ini, butir-butir sila Pancasila disebut dengan Strategi Manajemen Pancasila. Hal tersebut terjadi karena Pancasila telah mengilhami garis hidup masyarakat Indonesia yang mana tiap sila Pancasila memiliki kajian ilmiah. Manajemen Pancasila sudah lama terlahir sejak tahun 1945. Melalui Pancasila, terlahirlah konsep manajemen seperti stakeholders, interest, holistic approach, good governance, business ethics & triple bottom line. Bangsa Indonesia membuat konsep-konsep manajemen tersebut melalui Pancasila namun tanpa disadari pendiri bangsa Indonesia berhasil memperkenalkan konsep dasar negara yang bersifat holistik mulai dari aturan hubungan antar manusia dengan penciptanya, hubungan antar manusia warga negara Indonesia dan antar bangsa Indonesia dengan saudara-saudaranya di seluruh bagian dunia, mengatur tata kelola pemerintahan yang tidak ada kekuasaan mutlak kecuali demokrasi, mengatur perilaku berbisnis dan membangun perekonomian, mengatur kesejahteraan bersama bahkan sampai kepada perlindungan HAM. Artikel ini membahas Strategi Manajemen Pancasila untuk globalisasi dengan menggunakan kajian pustaka sebagai metodenya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa Indonesia sebagai objek terkena dampak globalisasi dan hampir belum ada penelitian yang menyatakan Indonesia sebagai subjek yang telah berhasil mewarnai globalisasi.*

#### **Kata kunci:**

*Pancasila, Manajemen Strategi, Konsep Manajemen*

### ABSTRACT

*Pancasila is a local wisdom and culture based management which is unseperateable from life view of Indonesia citizen. Values of Pancasila had already blessed the life of Indonesia Citizen, the meaning of each precepts value of Pancasila had a potential chance to bring Indonesia out of economic problems, political trouble, social & culture difference and business conflict. In this globalization era, precepts value of Pancasila area mentioned as Pancasila Strategy Management. Pancasila Management was already born in year 1945. Many kinds of management concept such as stakeholders, interest, holistic approach, good governance, business ethics & triple bottom line were born by Pancasila. Indonesia citizens created those kinds of management concept by using Pancasila, but without being noticed by Indonesia founder, Pancasila succeeded on introducing base concept of country which is holystic from a relationship attitude between human being and the creator, between Indonesia citizen or even other*

*citizen outside from Indonesia. It also rules the governont management which has no absolute power beside democraton, business attitude & build economical condition, citizen prosperous even protection of human rights. Through this article, the writer is discussing Pancasila Strategy Management on facing globalization by using literature review method. Previous research result was showing that Indonesia was an object, affected by the globalization. And as for Indonesia being a subject and taking in on globalization has shown no research result.*

**Keywords:**

*Pancasila, Management Strategic, Management Concepts*

## **Pendahuluan**

Pancasila terlihat sebagai idiologi yang berhadapaan dengan "ideologi global" , sebagai contohnya kapitalisme dan liberalisme. Pancasila dibangun untuk mensejahterakan dan menegakkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat dari titik lain dalam globalisasi yang sarat dengan hukum dan kaidah kapitalisme, bersifat pasar bebas dan terbuka. Dalam keadaan tersebut, rakyat Indonesia harus tetap kokoh dan kuat pada pendirian, bahwa semuanya tetap diabdikan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Bangsa yang diharapkan dalam era globalisasi bukanlah bangsa yang mengeluh, menyerah, mudah marah, tetapi bangsa yang mampu menyalurkan sumber-sumber potensi kesejahteraan yang ada di area global. Teknologi, modal atau informasi, semua sebagai potensi yang digunakan baik untuk meningkatkan kesejahteraan & kepentingan bangsa Indonesia, oleh sebab itu Indonesia dapat berdiri sebagai pemenang dalam globalisasi ini.

Globalisasi disebut sebagai era perubahan cepat yang mengandung makna positif, namun tidak menutup kemungkinan sisi negatifpun ikut terbawa. Tantangan bagi bangsa Indonesia harus padai dalam memilih, mencerna dan memanfaatkan peluang dari sisi positif dan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai yang telah diikrarkan, patut dibela serta dijunjung tinggi. Menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia harus dapat tegak melalui kedaulatan politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan memiliki daya lenting yang kokoh dalam pertahanan nasional. Lebih dari itu harus tetap memperkokoh jati diri sebagai Pancasilais yang menjunjung tinggi UUD 1945 dan memperkokoh NKRI. Setiap warga negara wajib mempertahankan negara agar kelangsungan hidup bangsanya dapat berlanjut dan demi mempertahankan negara, dibutuhkan sikap dan perilaku setiap warga negaranya. Warga negara yang aktif dan prihatin terhadap negara maka hidup bangsanya akan terpelihara. Sebaliknya jika warga negara tidak sedikitpun tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsanya, kelangsungan hidup bangsa akan terancam yang cepat atau lambat akan bubar Negaranya. Melihat dari pentingnya sifat aktif warga negara Indonesia, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu melaksanakan perannya dalam era global ini.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun nilai norma sebuah kelompok dan nilai penting ada terdapat kelompok yang dinaunginya sebagai acuan pergerakan sebuah organisasi kearah tujuan yang ditentukan. Dalam usaha untuk memenuhi harapan, dalam konteks membuat seluruh warga negara aktif berperan di Indonesia, pemimpin menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan lingkungan serta potensi yang dimiliki organisasi. Proses pencapaian tersebut dimulainya pembentukan nilai yang terjadi ketika interaksi antara manusia terjadi, dimana nilai dalam fungsi sehari-hari menjadi pedoman orang untuk berperilaku dan mengarahkan orang untuk bersikap dengan ketentuan sesuai norma yang berlaku. Ketika organisasi tanpa pemimpin yang menjadi acuan pedoman bagi anggotanya, maka organisasi tidak akan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemimpin yang dapat melakukan hal tersebut adalah pemimpin yang berbasis konsep Pancasila

yang mana butir-butir Pancasila dapat mewakili seluruh aspek kepemimpinan yang bersifat multikultural.

Multikulturalisme adalah sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati eksistensi semua kelompok beragam dalam suatu organisasi masyarakat, mengakui sosial budaya mereka yang berbeda-beda dan memungkinkan untuk mendorong kontribusi lanjutan dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan semua jenis potensi dalam organisasi masyarakat. Pembelajaran multikultural merupakan sebuah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan serta persamaan manusia yang seringkali dikaitkan dengan gender, ras dan kelas strata (Sleeter & Grant, 1988).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan suatu keadaan atau kondisi yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan memaparkan teori dan kajian dari peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

## Hasil Penelitian

Indonesia adalah negara yang sudah jelas berbentuk multikultural (majemuk dan plural) dan memiliki kebhinekaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dari jajahan, yaitu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan panjang telah dilalui oleh bangsa untuk bersatu yaitu perjuangan fisik, pertumpahan darah yang panjang dari generasi pendahulu bangsa demi Indonesia merdeka. Perjuangan yang berawal dari sebuah kebangkitan nasional hingga ikrar "sumpah pemuda" bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan bagi bangsa Indonesia. Para pendiri negara menyepakati Pancasila, yang merupakan bentuk kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, sebagai acuan hidup bangsa dan fondasi dasar negara. Posisi Pancasila sebagai filsafat, nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar (intrinstik) yang telah diakui secara universal dan tidak akan dapat dirubah oleh perkembangan waktu dari zaman ke zaman.

Sedangkan sebagai dasar Negara, peran Pancasila adalah sebagai ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani oleh bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Seiringan dengan jalannya waktu dan perkembangan sejarah bangsa, hal-hal yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi berbagai macam tantangan ujian baik dari dalam maupun dari luar. Globalisasi dan euphoria reformasi sebagai bentuk syarat dengan semangat perubahan telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Pemahaman generasi penerus bangsa mengenai nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI & Sesanti Bhinneka Tunggal Ika), semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sepaham dengan jati diri bangsa. Nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan terlupakan begitu saja & hal tersebut sangatlah ironis jika melihat betapa kerasnya perjuangan para pendahulu. Tanpa disadari, para pemuda Indonesia yang disebut-sebut sebagai generasi

penerus bangsa semakin menjauhkan diri dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat persatuan dan kesatuan. Memahami peranan Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki sikap persepsi yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika dihadapkan dengan perkembangannya dan dikaji secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kredibilitasnya menjadi dipermasalahkan dan diperdebatkan karena mulai diragukan secara politis dan akademis.

Sebagai negara dengan populasi penduduk 250 juta jiwa dan berlatar belakang berbeda seperti ras, suku, agama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia hidup dalam kebersamaan sesuai dengan semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika". Berdasarkan semboyan tersebut, keberagaman di Indonesia merupakan salah satu tonggak dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bukan malah pemecah belah bangsa. Kondisi keberagaman masyarakat berbudaya, secara positif menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang plural, namun secara negatif orang merasa tidak nyaman karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat ideologi yang etnosentris yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior dari pada kelompok etnik atau ras lain (Jones, dalam Liliweri, 2003). Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain, bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada salahnya generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Prasangka juga terarah kepada sebuah kelompok secara keseluruhan atau kepada seseorang hanya karena anggota kelompok tertentu.

Penerapan Pancasila masih belum sesuai harapan, masih banyak aliran menyesatkan yang tidak sesuai dengan sila ke-1, masih banyak masalah sosial terutama keadilan. Keadilan seolah-olah tidak berlaku untuk orang-orang kalangan atas, yang mana berakibat kesenjangan sosial. Ada berbagai masalah yang menyebabkan Pancasila sulit diimplementasikan, sebagai contoh perkembangan era global yang menghilangkan rasa nasionalisme bangsa. Sudah tidak ada lagi Pancasila sebagai ideologi dan masa depan bangsa melainkan hanya sebagai simbol peninggalan sejarah belaka. UUD RI Tahun 1945 dan NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah kurang dalam memahami dan menghayati Pancasila. Sementara itu, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa masih perlu ditingkatkan. Masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki jarak pandangan yang luas. Hal utama permasalahan pada perkembangan zaman jika dilihat dari realita yaitu bagaimana mengembalikan posisi Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi globalisasi

Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan, Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil beradab) agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melihat dari kutipan tersebut, sudah menjadi sewajarnya penerus bangsa mengembalikan derajat Pancasila ke martabat yang sesungguhnya

Pengembalian kedudukan Pancasila dapat dilakukan dengan cara menjadikan Pancasila kembali menjadi sorotan publik (public discourse). Dengan sorotan tersebut, Pancasila dapat menjadi arahan sebagai peninjauan kembali atas makna Pancasila selama ini yang nantinya akan memberikan pemikiran dan nilai makna baru. Dengan menjadikan Pancasila sorotan publik, Pancasila sudah berhasil melewati tahap awal yang kritis untuk kembalinya kehadiran para rakyat. Tahapan selanjutnya adalah pembelaan Negara yang sungguh-sungguh dijiwai oleh NKRI Pancasila dan UUD1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa. Itu merupakan

sebuah bukti proses bagi seluruh warga dalam menunjukkan keikutsertaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Beberapa contohnya yaitu melestarikan kekayaan budaya, terutama budaya adat daerah demi mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku tentu saja menjadi bentuk tindak perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Dengan mentaati hukum yang berlaku, Negara mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Lalu menentang kegiatan korupsi yang merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara yang sangat bertolak belakang dengan sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan tindakan ini, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Meningkatkan kualitas perilaku kehidupan beragama meski banyak pemeluk kepercayaan berbeda-beda namun harus tetap sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begini, perilaku-perilaku menyimpang seperti terorisme antar agama dan SARA dapat dicegah.

Pembelaan negara dapat juga dilakukan secara non-fisik dengan arti usaha-usaha yang berhasil menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme merupakan rangkaian pembuktian cinta dan sadar akan proses kehidupan dalam bangsa dan negara, serta upaya dalam memupuk rasa cinta tanah air. Selain itu pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan negara.

Globalisasi yang dipenuhi oleh majunya informasi ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berhasil merubah bentuk hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek. Negara seolah tanpa batasan, saling bergantung dan terhubung antara satu negara dengan negara lainnya. Dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang semakin kuat melalui konsep pasar bebas internasional. Dengan hadirnya ilmu teknologi yang canggih seperti internet dan media lainnya yang serupa memungkinkan manusia berhubungan dan berkomunikasi tiap saat dan tanpa batas. Bagi negara berkembang, hal tersebut dapat terlihat sebagai hal yang positif namun efek sampingnya yaitu disalahgunakan sebagai sarana untuk melemahkan ideologi, sosial politik, budaya dan pertahanan yang menjadikan hal ini merupakan tantangan terberat bagi generasi penerus bangsa. Bayangkan saja, hanya dengan pembentukan sebuah opini yang dipublikasi melalui jaringan internet serta penyebaran dokumen bersifat rahasia dapat membuat beberapa negara tidak stabil.

Persepsi bawah "perang" merupakan bukti pembelaan negara telah menjebak pemahaman bela negara antara rakyat dan wajib militer. Bela negara lebih diorientasikan untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Rakyat dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mengembalikan Pancasila dengan penuh agar kembali berperan aktif dan melewati era global. Butir-butir Pancasila yang telah tertulis di Kemhan RI sebagai sebuah strategi sudah dicantumkan tindakan strategi yang dapat mewujudkan impian bangsa.

Dalam Butir-Butir Pancasila Sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa (Kemhan RI, 2014) dinyatakan bahwa:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama.
4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Dalam butir-butir Pancasila sila ke-2 (Kemhan RI, 2014) dinyatakan sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Pancasila sila ke-3 telah membekali strategi untuk menghadapi globalisasi yang telah dituangkan dalam butir-butirnya sebagai berikut (Kemhan RI, 2014) :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
2. Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
3. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
4. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
5. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
6. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
7. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
8. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam butir-butir Pancasila sila ke-4 (Kemhan RI, 2014) para pendiri bangsa Indonesia telah memberikan strategi menghadapi globalisasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Pancasila sila ke-5 memberikan strategi bagaimana kiat-kiat untuk menjalankan kehidupan guna mencapai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir Pancasila sila ke-5 sebagai bentuk strategi tersebut adalah sebagai berikut (Kemhan RI, 2014):

1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama & melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.
11. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
12. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
13. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Untuk mewujudkan hidupnya kembali Pancasila, para pemerintah Indonesia harus dapat mencari sosok pemimpin veteran yang masih menganut ideologi Pancasila. Dengan pemimpin dengan latar belakang Pancasila lah, Indonesia dapat mengembalikan posisi Pancasila. Hanya merekalah yang mampu membuktikan bahwa jalan Pancasila adalah benar dan dijalan pada zaman dahulu. Hanya merekalah yang mengetahui celah-celah perubahan pada zaman global dan dari celah tersebut mereka mampu membalikkan Pancasila. Hal ini sekaligus aksi serah terima warisan dan jabatan kepada penerus bangsa.

Berbicara tentang nilai-nilai Pancasila tidak bisa terlepas dari pengertian dasar Pancasila. Pancasila merupakan kumpulan lima nilai unidimensional yang dijadikan acuan tingkah laku bangsa Indonesia. Kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan pada sila pertama, kemanusiaan pada sila kedua, patriotisme pada sila ketiga, demokrasi pada sila keempat, dan keadilan sosial pada sila kelima. Sejalan dengan itu Daroeso (1989) menjelaskan bahwa apabila kita merujuk pada sejarah jauh sebelum Soekarno menggali nilai Pancasila yang dikenal saat ini, konsep Pancasila sudah lebih dahulu terdokumentasikan di kerajaan Majapahit yang terdapat dalam kitab gubahan Mpu Sutasoma milik Mpu Tantular. Kitab tersebut merumuskan lima karma, yaitu yang pertama tidak boleh melakukan kekerasan, kedua tidak boleh mencuri, ketiga tidak boleh berjiwa dengki, dan keempat tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Sila pertama dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan. Dimana sila pertama ini terkait dengan karakter transedensi yang merupakan kekuatan yang menempa hubungan individu dengan semesta yang lebih luas serta menyediakan makna. Dalam transedensi terdapat apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan, rasa syukur (gratitude), harapan, humor, dan religiusitas; hal-hal yang merupakan bagian dari sila pertama. Poin ketuhanan ini mengisyaratkan harus dijunjungnya toleransi antarumat beragama. Keberadaan

berbagai penganut agama berbeda di Indonesia bukan tidak mungkin dapat menimbulkan adanya konflik. Oleh sebab itu, nilai ketuhanan dianggap penting untuk dijadikan landasan kehidupan bernegara, yaitu sebagai salah satu poin yang tercantum dalam Pancasila (Meinarno, 2012).

Nilai mengenai kemanusiaan diangkat menjadi poin yang tercakup pada sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan yang ini lebih menekankan pada perlakuan seorang individu terhadap individu atau masyarakat lainnya. Berdasarkan sila ini, setiap orang harus menghormati dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, dituntut pula adanya sikap adil dalam memperlakukan orang lain, tanpa melihat suku, ras, ataupun perbedaan lainnya yang dimiliki orang lain tersebut. Poin mengenai persatuan dicantumkan pada sila ketiga Pancasila. Persatuan sebagai nilai ini berusaha dicapai dengan dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Penggunaan Bahasa Indonesia di berbagai kegiatan, misalnya dalam kegiatan akademis, perdagangan, pergaulan, diharapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat di Indonesia meskipun mereka berasal dari suku atau agama yang berbeda. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, akan terpupuk rasa persatuan bagi masyarakat Indonesia karena adanya kebakuan yang dipahami secara bersama-sama (Meinarno, 2012).

Pada sila keempat, tercantum nilai mengenai tanggung jawab dan harmoni. Nilai ini merupakan nilai yang kental bagi Indonesia yang menganut budaya demokrasi. Nilai sila keempat lah yang mendasari warga negara untuk dapat memahami keputusan yang diambil pemimpin (yang awalnya dipilih secara bersama pula) untuk kemaslahatan bersama. Nilai keempat ini juga berhubungan dengan keutamaan keadilan dan transedensi. Sila terakhir Pancasila mengenai keadilan sosial yang harus diwujudkan di Indonesia. Tampaknya hal-hal di dalam nilai kelima ini erat dengan bagaimana rasa adil tidak semata untuk diri, tapi untuk masyarakat tempat individu berada. Pembuatan kategori ini merupakan dampak logis dari tidak terbentuknya satu konstruk Pancasila sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya (Suwartono & Meinarno, 2011; 2012). Justru hasil ini seakan menegaskan bahwa ide dasar yang diajukan oleh Soekarno tepat adanya yakni kumpulan nilai. Hal ini agak berseberangan dengan ide dari Soeharto yang lebih menekankan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan utuh yang masing-masing sila saling menjiwai. Dengan cara pandang itu maka Pancasila sering disebut sebagai satu konstruk.

Implikasi lainnya adalah bahwa Pancasila merupakan sistem nilai. Susunan nilai terdiri dari gagasan-gagasan yang tertanam dalam otak sebagian besar masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Dengan demikian suatu sistem nilai biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 1974). Ide ini sejalan dengan pernyataan Soekarno saat rapat pada tanggal 1 Juni 1945 yang menggagas tentang dasar Negara Indonesia.

Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter Keindonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (integrative value), titik temu (common denominator), jati diri bangsa (national identity) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan atau ideal value (Winarno Narmoatmojo, 2010).

Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun. Karakter, identitas atau jati diri sebuah bangsa bukanlah sesuatu yang telah jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan melalui pendidikan. Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan

bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Pancasila memberikan suatu arah dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Moerdiono (1999) menjelaskan bahwa terdapat tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dimana ketiga nilai ini menjadi suatu bagian yang menjadi penentu sukses dan tidaknya implementasi dari pelaksanaan nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila. Ketiga nilai ini terjabar dalam uraian yang antara lain:

Pertama Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat

Kedua Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Jika mengacu pada lima sila Pancasila, maka menurut Gunawan (2012). Pancasila sebagai inti karakter bangsa Indonesia, mengandung lima pilar karakter, yakni: pertama transendensi, menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari-Nya akan memunculkan penghambaan semata-mata pada Tuhan. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya. Dimana manusia menggunakan pemikiran mendalam untuk mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia; kedua humanisasi, dimana hal ini merupakan proses menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. setiap manusia pada hakikatnya setara di hadapan Tuhan kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya, manusia diciptakan sebagai subyek yang memiliki potensi; ketiga kebinekaan, kesadaran akan ada sekian banyak perbedaan di dunia, akan tetapi, mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan; keempat liberasi, pembebasan atas penindasan sesama manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia; dan kelima keadilan, merupakan kunci kesejahteraan, adil tidak berarti sama, tetapi proporsional.

## Pembahasan

Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seorang yang menjadi pimpinan organisasi. Apabila pancasila dijadikan sebagai landasan idiologi maka harus memuat tiga macam nilai utama yaitu nilai dasar, instrumental dan praksis. Kemudian apabila pancasila dijadikan sebagai basis utama dalam menjalankan organisasi maka transendensi, humanisasi, kebinekaan dan keadilan harus menjadi pegangan ketua dalam organisme.

## Kesimpulan

Kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila merupakan upaya membumikan Pancasila di pada semua ormas dan lembaga. Kepemimpinan yang menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila mutlak harus diimplementasikan, di tengah terbukanya tatanan global. Ormas dan lembaga sebagai tempat berkumpulnya orang mengemban tugas untuk mengukuhkan, memformulasikan, menyatukan, dan menciptakan masyarakat yang berasaskan Pancasila disetiap sendi-sendi kehidupan. Pimpinan ormas dan lembaga merupakan keyperson terwujudnya lingkungan dan budaya organisasi yang Pancasila. Pimpinan dalam seluruh kegiatan memiliki kewajiban menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya, dengan memasukkan kandungan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan dan program organisasi. Kalau mengacu pada sila-sila Pancasila, maka diperoleh beberapa hal penting terkait dengan pilar-pilar nilai kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam setiap lembaga, antara lain, pertama transendensi, kedua humanisasi, ketiga kebhinekaan, keempat liberasi, dan kelima keadilan. Lima pilar nilai kepemimpinan Pancasila tersebut menjadi kepemimpinan yang ditampilkan oleh pimpinan dalam memimpin ormas atau lembaganya. Jika pimpinan menampilkan sifat lima pilar kepemimpinan Pancasila dan juga menampilkan keteladanan yang menjwai Pancasila, maka anggota atau pegawai pun akan meneladani pimpinan. Sehingga ormas atau lembaga menjadi wahana yang efektif dalam merevitalisasi dan membumikan Pancasila. Ormas dan lembaga menjadi model penerapan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila

Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggapi sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu.

Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek. Negara seolah tanpa batas (borderless), saling tergantung (interdependency) dan saling terhubung (interconnected) antara satu negara dengan negara lainnya. Saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan warganya. Bela negara adalah membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional. Bela negara tidak hanya berhubungan dengan kepentingan militer semata tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme.

## Daftar Pustaka

- Alex Suseno, 2000 Strategi Pembudayaan Kesadaran Hak Bela Negara Tahun 2000- 2004, Jakarta,
- Banks, J.A. 1993. "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice" In Review of Research in Education, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington, D.C.: American Educational Research Association.
- Farris, P.J. & Cooper, S.M, 1994, Elementary Social Studies: a Whole language Approach. Iowa Brown&Benchmark Publishers
- M. Ali, 2006 Menuju Multikultural Global, <http://www2.kompas-cetak>, diakses pada tanggal 3 Februari 2009
- Saeful Rahmat, 2008, Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia, <http://www2.kompas-cetak>, diakses pada tanggal 3 Februari 2009
- Meinarno, E. A. Dkk. (2011). Manusia Dalam Kebudayaan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miftah T. 2010. Kepemimpinan dan Manajemen. Rajawali Press: Jakarta. Moerdiono. (1999). Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat
- Mustika Zed. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Nasional Siswanto S. (2003). Manajemen tenaga kerja, edisi 2. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Solihah, Euis dan Hersugondo. 2008. Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi. Fokus Ekonomi (FE), Vol.7, No.2 Hal. 83-93
- Suparlan, Pi, (1999), "Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme". Jurnal Studi Amerika, vol.5 Agustus, hal. 35-42.
- Wahjosumidjo. (1999). Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi. (2009). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organization). Bandung: Alfabeta.
- Winarno Narmoatmojo. (2010). Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta: Ombak
- Yamin, Martinis dan Maisah. (2010). Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: Persada Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Azra, A. (2006). Pancasila dan identitas nasional Indonesia: perspektif multikulturalisme. Dalam restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik identitas dan modernitas. Bogor. Brighten Press
- Arif, M. (2014). Model kerukunan sosial pada masyarakat multikultural cina benteng (kajian historis dan sosiologis). Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1
- Faisal, S. (1992). Format-format penelitian sosial (dasar-dasar dan aplikasi) Jakarta: Rajawali. Arief F. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Danim, S. (2004). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Penerbit Rineka Cipta.
- Daroeso, Bambang. (1989). Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila. Semarang: Aneka Ilmu.
- Gunawan, Heri. (2012). Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta. Koentjaraningrat. (1974). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Koentjaraningrat. (1982). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Setiadi, E. (2002). Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi Hukum dan Penegakan Hukum. *Mimbar*, XVIII(4), 443–456. <https://media.neliti.com/media/publications/156862-ID-pengaruh-globalisasi-terhadap-subtansi-d.pdf>

Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS*, I(2), 100–119. <file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf>

Susanto, J. (2000). *Kajian Teoritik Tentang Pengaruh Globalisasi*. 2, 59–72.

Syarbaini, S. (2017). Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Ekonomi. 14, 126–139.

Wikipedia. (2021). Pancasila. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

Winarno, B. (2008). Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi. *Jurnal Global Dan Strategis*, 3(2), 123–141.

Winarno, B. (2014). Globalisasi dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Inetegrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0041.1-12>

World Economic Forum. (2017). What is Globalisation Anyway? World Economic Forum, April. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16793.93288>

Absiroh, U. (2017). Understanding of History 350 Years Indonesia Colonized By Dutch. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau*, 1, 1–15. <https://www.neliti.com/publications/205480/sejarah-pemahaman-350-tahun-indonesia-dijajah-belanda>

Al-Rodhan, N., & Stoudmann, G. (2006). Definitions of globalization: A comprehensive overview and a proposed definition. *Occasional Papers, Geneva Centre ...*, 1–21. [http://www.academia.edu/download/30929642/Definitions\\_of\\_Globalization\\_-\\_A\\_Comprehensive\\_Overview\\_and\\_a\\_Proposed\\_Definition.pdf](http://www.academia.edu/download/30929642/Definitions_of_Globalization_-_A_Comprehensive_Overview_and_a_Proposed_Definition.pdf)

Haryono, T. (1997). Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara Sampai Rajaswadhanna. *Jurnal Humaniora*, V, 107–113.

Hidayat, R. (2020). Dunia dan Din (Agama) Di Tengah Arus Globalisasi. *JSA*, 2507(June), 1–9. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/download/6160/3186/>

Hutagalung, D. (2016). ANTARA HASRAT DAN JERAT GLOBALISASI - NEOLIBERAL. May 2012.

KemensekRI. (2016). Kepres No 24 Tahun 2016. KemensekRI. [file:///C:/Users/User/Downloads/Keppres Nomor 24 Tahun 2016.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Keppres%20Nomor%2024%20Tahun%202016.pdf)

Kemhan RI. (2014). 45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dirjen Perencanaan Pertahanan. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>

Nurhayati, D. (2015). STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DIBIDANG EKONOMI. *Jurnal Heritage*, 3(1).

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents?q=STRATEGI+INDONESIA+DALAM+MENGHADAPI+TANTANGAN+GLOBAL++DIBIDANG+EKONOMI>

Pradhani, S. I. (2017). Sejarah hukum maritim kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam hukum Indonesia kini (The history of Sriwijaya and Majapahit maritime laws in Indonesia law today). *Lembaran Sejarah*, 13(2), 186–203.